



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Perbandingan Efektivitas Fungsi UNDP di Indonesia dan Tuvalu**  
**Mengatasi Permasalahan Ketidaksetaraan Gender dalam**  
**Konteks Partisipasi Politik Perempuan**

Skripsi

Oleh  
Pingkan Audrine  
2014330089

Bandung  
2017



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Perbandingan Efektivitas Fungsi UNDP di Indonesia dan Tuvalu**  
**Mengatasi Permasalahan Ketidaksetaraan Gender dalam**  
**Konteks Partisipasi Politik Perempuan**

Skripsi

Oleh

Pingkan Audrine

2014330089

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Pingkan Audrine  
Nomor Pokok : 2014330089  
Judul : *Perbandingan Efektivitas Fungsi UNDP di Indonesia dan Tuvalu Mengatasi Permasalahan Ketidaksetaraan Gender dalam Konteks Partisipasi Politik Perempuan*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 20 Desember 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. Atom Ginting Munthe

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D

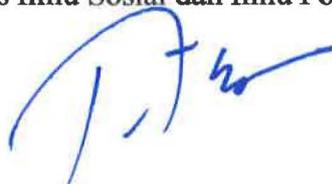
:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Sylvia Yazid, Ph.D

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pingkan Audrine  
NPM : 2014330089  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Perbandingan Efektivitas Fungsi UNDP di Indonesia dan Tuvalu Mengatasi Permasalahan Ketidaksetaraan Gender dalam Konteks Partisipasi Politik Perempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Desember 2017



Pingkan Audrine

## **Pernyataan**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pingkan Audrine

NPM : 2014330089

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Perbandingan Efektivitas Fungsi UNDP di Indonesia dan Tuvalu Mengatasi Permasalahan Ketidaksetaraan Gender dalam Konteks Partisipasi Politik Perempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Desember 2017

Pingkan Audrine

## Abstrak

Nama : Pingkan Audrine

NPM : 2014330089

Judul : Perbandingan Efektivitas Fungsi UNDP di Indonesia dan Tuvalu  
Mengatasi Permasalahan Ketidaksetaraan Gender dalam Konteks  
Partisipasi Politik Perempuan

---

Ketidaksetaraan gender merupakan masalah global yang masih terjadi hingga saat ini dan termanifestasi dalam ragam konteks, termasuk ranah politik. Proporsionalitas representasi perempuan dalam pemerintahan, khususnya di parlemen menjadi sangat penting mengingat hal ini turut dijamin di dalam konvensi internasional, seturut dengan upaya promosi hak asasi manusia dan pemerintahan yang demokratis. Indonesia dan Tuvalu sebagai negara kepulauan penganut sistem demokrasi tak luput dari permasalahan ketidaksetaraan gender dalam konteks partisipasi politik perempuan. Menyikapi permasalahan tersebut, negara membuka diri terhadap bantuan dari organisasi internasional, dalam hal ini ialah UNDP, untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan efektivitas dari langkah-langkah yang ditempuh oleh UNDP selaku organisasi internasional dalam upayanya membantu pemerintah Indonesia dan Tuvalu mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender dalam konteks partisipasi politik perempuan pada tahun 2011 – 2016. Dengan mengambil pertanyaan riset: “Bagaimana perbandingan efektivitas fungsi UNDP membantu pemerintah Indonesia dan Tuvalu mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender dalam konteks partisipasi politik perempuan?” Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah liberalisme institusional dengan beberapa konsep pendukung seperti organisasi internasional, hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Sebagai penelitian komparatif, penulis menggunakan alat ukur berupa *Outcome Evaluation* dengan tiga buah indikator yang mencakup: faktor-faktor pendukung pencapaian *outcome*, kontribusi yang telah dilakukan oleh UNDP untuk membuat *outcome*, dan strategi kerjasama yang dibangun untuk mencapai *outcome*.

Berdasarkan pada analisa yang dibangun menggunakan alat ukur dan indikator yang ada, penulis melihat bahwa efektivitas fungsi yang dimiliki oleh UNDP selaku organisasi internasional lebih efektif dalam membantu negara Tuvalu jika dibandingkan dengan negara Indonesia dalam rentang waktu 2011 hingga 2016.

## ***Abstract***

Name : Pingkan Audrine

NPM : 2014330089

Title : *Effectivity Comparison of UNDP Function in Indonesia and Tuvalu in Order to Overcome Gender Inequality in the Context of Women Participation in Politics*

---

*Gender inequality still become a global problem until nowadays and it is manifested into various context, including politics The proportionality of women's representation in government, especially in parliament becomes very important as it is guaranteed in international conventions, in accordance with the promotion of human rights and democratic governance. As an archipelagic country which are adherents of the democratic system, both Indonesia and Tuvalu are not spared from the issue of gender inequality in the context of women's political participation. As a response to this problem, states open for the possibility of coordination and assistance from international organizations, in this case is UNDP, to help overcome the existing problem.*

*This research aims to identify and describe the comparative effectiveness of the steps taken by UNDP as an international organization in its efforts to help the Indonesian and Tuvalu governments address the issue of gender inequality in the context of women's political participation in 2011-2016 with the research question: "How does the comparative effectiveness of the function of UNDP help the Indonesian and Tuvalu governments address the issue of gender inequality in the context of women's political participation?". In this research I use the theory of institutional liberalism along with the concept of international organization, human rights and gender equality. As a comparative research, I use Outcome Evaluation as the measuring instrument which consists of three indicators: supporting factors of the achievement of outcomes, contributions made by UNDP to make outcomes, and strategy of cooperation which developed to achieve outcomes.*

*Based on the analysis built using existing measuring instrument and indicators, the authors see that the effectiveness of the functions possessed by UNDP as an international organization is more effective in assisting Tuvalu countries compares to the Indonesia within the period of 2011 to 2016.*

## **Kata Pengantar**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat penyertaannya dalam setiap langkah perjalanan studi yang boleh penulis tempuh dari awal masa studi hingga proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Hingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Perbandingan Efektivitas Fungsi UNDP di Indonesia dan Tuvalu Mengatasi Permasalahan Ketidaksetaraan Gender dalam Konteks Partisipasi Politik Perempuan”*

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis kerap kali menemui hambatan dan tantangan. Namun berkat bantuan dari banyak pihak, pada akhirnya skripsi ini pun dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam kajian organisasi internasional di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

## **Ucapan Terima Kasih**

Dalam kesempatan ini tak lupa peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dan telah menemani serta memberi dukungan kepada peneliti dari awal masa perkuliahan di kampus Universitas Katolik Parahyangan hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari program studi Ilmu Hubungan Internasional.

Peneliti menghaturkan puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaan dan rahmat-Nya dalam hidup, dalam studi, kegiatan kemahasiswaan serta dinamika perkuliahan yang boleh peneliti lalui selama tiga setengah tahun hidup di Bandung. Tak lupa kepada kedua orang tua dan kedua adik peneliti yang telah memberikan dukungan dalam segala aspek hingga akhirnya peneliti berhasil menyelesaikan studi.

Teruntuk teman-teman peneliti yang telah memulai dan mengarungi masa-masa perkuliahan di HI UNPAR sejak semester pertama: Allise, Thaya, Ghinaa, Dargo, Gentha, Aryo, Dhanny, Bryan, Celine, Livia, Ola, dan Benita. Teman sepermainan peneliti dalam mata kuliah *Security Studies* yang bertransformasi menjadi rekan-rekan delegasi Saudi Arabia dalam Praktik Diplomasi MMXVI: Tiomas, Celine dan Dika. Juga kepada Petra, Raszi, Bagus, Kenneth, Jova, Timmy, Reyhan, Uca serta Echa, Nadia, Lola, Marina, Ajeng, Bonita yang menjadi teman-teman berpetualang peneliti selama berdinamika di kampus. Partner kerja sekaligus teman-teman peneliti dalam kegiatan “RUN” dan “PMKT” yang telah bersama-sama berdinamika untuk kampus tiga. Serta keluarga besar HI UNPAR 2014 dan rekan-rekan Majelis Perwakilan

Mahasiswa dan Persatuan Mahasiswa UNPAR Periode 2016/2017 yang telah bersama-sama menjalani suka duka selama kehidupan kampus ini.

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ucapan Terima Kasih .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xi
<b>BAB I – Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Deskripsi Masalah .....	8
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	11
1.2.3 Perumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Kajian Terdahulu.....	13
1.5 Kerangka Pemikiran .....	18
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Penelitian .....	26
1.6.1 Metode Penelitian.....	26

1.6.2	Jenis Penelitian .....	26
1.6.3	Teknik Pengumpulan Data.....	27
1.7	Sistematika Pembahasan.....	27
1.8	Linimasa Penulisan .....	30
<b>BAB II - UNDP (United Nations Development Programme) sebagai Organisasi Internasional .....</b>		<b>31</b>
2.1	UNDP dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Keanggotaannya.....	31
2.2	Tujuan, Visi, dan Misi UNDP .....	33
2.2.1	Tujuan UNDP .....	33
2.2.2	Visi UNDP .....	34
2.2.3	Misi UNDP .....	35
2.3	Lingkup Kerja dan Struktur UNDP .....	36
2.3.1	Lingkup Kerja UNDP .....	36
2.3.2	Struktur UNDP .....	39
2.4	UNDP dan Program-Program dalam Lingkup Promosi <i>Democratic Governance</i> yang berfokus pada kesetaraan gender .....	43
2.4.1	UNDP Indonesia Office .....	45
2.4.2	UNDP Pacific Office .....	46
<b>BAB III – Perbandingan Kondisi Ketidaksetaraan Gender di Indonesia dan Tuvalu .....</b>		<b>49</b>
3.1	Indonesia .....	50

3.1.1 Kondisi Ketidaksetaraan Gender Secara Khusus dalam Ranah Partisipasi Politik di Indonesia .....	54
3.1.2 Faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender .....	57
3.1.3 Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Indonesia.....	59
3.2 Tuvalu .....	61
3.2.1 Kondisi Ketidaksetaraan Gender Secara Khusus dalam Ranah Partisipasi Politik di Indonesia .....	62
3.2.2 Faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender .....	63
3.2.3 Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Tuvalu .....	65
<b>BAB IV - Analisa Perbandingan Efektivitas Fungsi UNDP di Indonesia dan Tuvalu Mengatasi Permasalahan Ketidaksetaraan Gender dalam Konteks Partisipasi Politik Perempuan .....</b>	<b>69</b>
4.1 Upaya UNDP dalam Mengatasi Ketidaksetaraan Gender dalam Konteks Partisipasi Politik Perempuan .....	70
4.1.1 Upaya UNDP di Tuvalu....	71
4.1.1.1 SWARGA .....	71
4.1.2 Upaya UNDP di Tuvalu .....	74
4.1.2.1 Pacific Women in Politics .....	75
4.1.2.2 Practice Parliament for Women .....	77
4.2 Efektivitas Fungsi UNDP .....	80
4.3 Analisa Perbandingan Efektivitas Fungsi UNDP .....	81
<b>BAB V – Kesimpulan .....</b>	<b>91</b>

**DAFTAR PUSTAKA** .....94

**Lampiran** ..... 101

## **Daftar Tabel**

Tabel 1.1 “Dokumen Pendukung HAM” .....	3
Tabel 1.2 “Daftar Ratifikasi Dokumen Pendukung HAM” .....	4
Tabel 4.1 “Efektivitas Fungsi UNDP di Indonesia” .....	82
Tabel 4.2 “Efektivitas Fungsi UNDP di Tuvalu” (PacWIP) .....	85
Tabel 4.3 “Efektivitas Fungsi UNDP di Tuvalu” (Practice Parliament for Women) .....	87

## **Daftar Gambar**

Gambar 2.1 “Struktur Organigram UNDP” .....	40
Gambar 3.1 “Diagram Persentase Penduduk Indonesia Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan” .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap individu terlahir dengan memiliki hak yang sama. Terlepas dari identitas kenegaraan, suku bangsa, agama, ras, golongan dan gender yang dimiliki oleh individu tersebut, hak asasi manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat dan patut untuk dihormati dan ditegakkan. Secara umum HAM meliputi ragam aspek mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya. Baik perempuan atau pun laki-laki memiliki kesempatan yang sama atas pemenuhan ketiga aspek tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, terlebih di negara yang menganut sistem demokrasi.

*Oxford Concise Dictionary of Politics* mendefinisikan HAM sebagai kelengkapan khusus yang melekat pada setiap diri individu dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral.<sup>1</sup> Eksistensi HAM dalam ranah internasional semakin diperkokoh dengan lahirnya “*Universal Declaration on Human Rights*” (UDHR) pada *UN General Assembly* yang berlangsung tahun 1948. Salah satu poin penting yang tercantum dalam Preambule UDHR menyebutkan bahwa pengakuan atas martabat alamiah serta hak-hak yang sama dan mutlak dari seluruh umat manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Oleh karena itu keberlangsungan pemenuhan HAM merupakan arti penting bagi negara-negara di dunia, terlebih bagi negara-negara yang telah mengadopsi deklarasi universal tersebut

---

<sup>1</sup> Iaian McLean dan Alistair McMillan, “*The Concise Oxford Dictionary of Politics – Third Edition*”, (Oxford: Oxford University Press, 2009), halaman 250.

ke dalam hukum nasionalnya.

Adapun HAM memiliki tiga buah prinsip utama yang tercantum dalam UDHR yaitu universalitas, integrasi dan non-diskriminasi. Yang dimaksudkan dengan prinsip universalitas ialah bahwa setiap negara memiliki tugas untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Sedangkan prinsip integrasi menekankan bahwasannya semua hak: hak politik, hak sosial, hak budaya, hak sipil, hak atas pendidikan, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak atas pekerjaan saling berkaitan satu sama lain dan merupakan kesatuan dalam hak asasi manusia. Berbeda dengan kedua prinsip sebelumnya, non-diskriminasi merupakan prinsip yang berkaitan erat dengan kebebasan dan larangan atas segala bentuk tindakan yang membedakan dan cenderung bersifat tidak adil.<sup>2</sup>

Bertolak dari penjelasan di atas, HAM memiliki arti penting bagi masyarakat. Banyak negara telah menaruh perhatian pada pentingnya penegakkan HAM. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa bagi negara Indonesia maupun negara Tuvalu selaku objek kajian, keduanya telah menaruh perhatian pada pentingnya upaya penegakkan HAM bagi warga negara masing-masing. Peneliti memilih untuk mengkaji mengenai Indonesia dan Tuvalu karena kedua negara ini merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, berbentuk kepulauan dan memiliki persebaran penduduk perempuan dan laki-laki yang cukupimbang yaitu 49,66% dan 50,34%

---

<sup>2</sup> "What are Human Rights?", *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner*, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx> diakses pada 27 Februari 2017.

untuk Indonesia<sup>3</sup> sedangkan untuk Tuvalu 51% dan 49%<sup>4</sup> diantara negara-negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, kedua negara tersebut merupakan negara tujuan UNDP dalam mengembangkan fokus kerjanya untuk ranah demokrasi, dalam hal ini ialah partisipasi politik perempuan.

**Tabel 1.1**  
**Dokumen Pendukung HAM**

<b>Indonesia</b>	1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
	2	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia
	3	Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
<b>Tuvalu</b>	1	Konstitusi Tuvalu, Bagian II membahas khusus tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menjunjung tinggi pemenuhan hak asasi manusia warga negaranya. Komitmen terhadap hak asasi manusia termanifestasikan dalam kelengkapan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia menyangkut hak asasi manusia, yang meliputi: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia; dan 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. “*Indikator Strategis Nasional: Jumlah Penduduk*”  
<https://www.bps.go.id/QuickMap?id=0000000000> diakses pada 15 Oktober 2017

<sup>4</sup> Tuvalu Central Statistics Division, “*Tuvalu Statistics at a Glance*”, <http://tuvalu.prism.spc.int/> diakses pada 16 November 2017

tentang Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan Indonesia, pemerintah Tuvalu berkomitmen untuk menjamin dan memenuhi hak asasi manusia dengan adanya Konstitusi Tuvalu yang terdiri dari 10 bagian. Pada bagian kedua dalam konstitusi terdapat aturan-aturan yang berkenaan dengan hak asasi manusia yang sejalan dengan *Bill of Rights* dan dilengkapi dengan 5 divisi yang mengatur tentang justifikasi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi di Tuvalu, prinsip-prinsip hak asasi manusia, upaya proteksi hak asasi manusia, klasifikasi keadaan darurat, serta penegakkan hukum yang berkenaan dengan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

**Tabel 1.2**  
**Daftar Ratifikasi Dokumen Pendukung HAM**

	<i>“International Covenant on Civil and Political Rights”</i>	<i>“Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women”</i>
<b>Indonesia</b>	23 Mei 2006	13 September 1984
<b>Tuvalu</b>	n/a	6 Oktober 1999

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Pemerintah Indonesia dan Tuvalu juga menyadari perlindungan hak asasi manusia secara spesifik dengan berfokus pada hak politik dan hak perempuan. Bagi pemerintah Indonesia hal ini tampak pada komitmen negara Indonesia di dalam dua dokumen hukum internasional yang telah diratifikasi seperti yang tertera pada Tabel

<sup>5</sup> Pacific Island Legal Information Institute, *“Constitution of Tuvalu”*, [http://www.paclii.org/tv/legis/consol\\_act/cot277/](http://www.paclii.org/tv/legis/consol_act/cot277/) diakses pada 14 Maret 2017.

1.2 di atas. Pertama, “*International Covenant on Civil and Political Rights*” (ICCPR) yang berisikan mengenai 30 butir pasal yang terbagi ke dalam enam bagian dan mengatur mengenai hak-hak masyarakat sipil menyangkut determinasi diri, kesetaraan perempuan, privasi, partisipasi politik serta prinsip non-diskriminasi telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 23 Mei 2006.<sup>6</sup> Kedua, “*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*” (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia pada 13 September 1984. CEDAW berisikan 30 butir pasal yang secara spesifik memaparkan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dalam ragam aspek dengan berpegang pada prinsip non-diskriminasi. Sedangkan bagi negara Tuvalu, dari dua dokumen tersebut hanya CEDAW yang telah diratifikasi, yaitu pada tanggal 6 Oktober 1999.<sup>7</sup>

Melalui dokumen-dokumen hukum yang telah dimiliki maupun diratifikasi oleh Indonesia dan Tuvalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah Tuvalu melalui Kementerian Lingkungan, Luar Negeri, Ketenagakerjaan dan Perdagangan telah menaruh perhatian terhadap pentingnya hak asasi manusia, secara spesifik pada perempuan. Namun sayangnya perilaku diskriminatif masih saja terjadi dan seringkali memberatkan bagi perempuan. Hal ini dapat dilihat melalui minimnya peran serta perempuan dalam fungsi keterwakilan di kursi pemerintahan di Indonesia dan Tuvalu. Tercatat bahwa pada tahun 2012 hanya

---

<sup>6</sup> United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “*International Covenant on Civil and Political Rights*”, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx> diakses pada 28 Februari 2017.

<sup>7</sup> United Nations Women, “*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*”, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm> diakses pada 28 Februari 2017.

terdapat 18 % perempuan yang menempati posisi politis dan memiliki peran sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dari kuota minimum sebesar 30 %.<sup>8</sup> Hal ini jelas menggambarkan bahwa kesetaraan gender belum optimal walaupun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur dan menjamin hak-hak perempuan dalam aspek politik.

Sejalan dengan kondisi di Indonesia, pada rentang waktu dari tahun 1990 hingga 2015 rata-rata partisipasi politik perempuan dalam parlemen di Tuvalu hanya berada pada angka 2,75 % dengan titik terendah 0 % pada tahun 1999 dan titik tertinggi 8,7 % pada tahun 1997. Posisi terakhir di tahun 2016 mengalami penurunan hingga mencapai titik 6,7 %.<sup>9</sup>

Pemerintah tidak dapat berdiri sendiri dalam menyikapi tantangan yang ada terkait dengan pemenuhan hak politik perempuan Indonesia. Dalam hal ini *United Nations Development Programme* (UNDP) hadir sebagai organisasi internasional yang membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan diskriminasi yang muncul berbasis gender pada tataran pemerintahan demokratis di Indonesia dan Tuvalu. UNDP merupakan bagian dari PBB yang memiliki fungsi advokasi terhadap perubahan dan menghubungkan negara-negara dengan pengetahuan, pengalaman dan sumber daya guna membantu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dan Tuvalu dalam

---

<sup>8</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Keterwakilan Perempuan di DPRD Palembang Berada Dalam Kluster Kedua Dengan Mencapai 18 % Kursi", <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/290/keterwakilan-perempuan-di-dprd-palembang-berada-dalam-kluster-kedua-dengan-mencapai-18-kursi> diakses pada 1 Maret 2017.

<sup>9</sup> The Global Economy, "*Tuvalu Women in Parliament 1990-2015*" [http://www.theglobaleconomy.com/Tuvalu/Women\\_in\\_parliament/](http://www.theglobaleconomy.com/Tuvalu/Women_in_parliament/) diakses pada 14 Maret 2017.

mengimplementasikan prioritas-prioritas nasional yang berkenaan dengan pemerintahan yang demokratis. Adapun prioritas nasional Indonesia terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015 yang salah satu fokusnya ialah dengan mempromosikan pemerintahan yang lebih demokratis dengan menitikberatkan pada kesetaraan gender.<sup>10</sup> Sedangkan untuk Tuvalu, prioritas nasional tertuang dalam dokumen *Te Kakeega II – National Strategy for Sustainable Development 2005-2015* yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Perencanaan Pembangunan dan Industri Pemerintah Tuvalu.<sup>11</sup>

## 1.2. Identifikasi Masalah

Setelah memaparkan mengenai latar belakang dari topik yang diangkat dalam penulisan penelitian, pada bagian ini peneliti akan menjabarkan mengenai permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Dimulai dari pemaparan mengenai deskripsi masalah, kemudian dilanjutkan dengan pembatasan masalah hingga rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kontekstual terhadap kondisi permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian.

---

<sup>10</sup> United Nations Development Programme, “*Overview of UNDP in Indonesia*”, <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/ourwork/overview.html> diakses pada 1 Maret 2017.

<sup>11</sup> Ministry of Finance, Economic Planning and Industries of Tuvalu, “*Te Kakeega II – National Strategy for Sustainable Development 2005-2015*”, (Funafuti: Envisage Co. Ltd, 2005).

### 1.2.1 Deskripsi Masalah

Dalam praktiknya, tidak semua individu dapat menikmati hak yang sama. Walau hak-hak tersebut sudah terjamin dalam dokumen hukum dan terkodifikasi secara nasional dan internasional, beragam bentuk pelanggaran HAM nyatanya masih terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Secara khusus diskriminasi pada aspek politik dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis di Indonesia dan Tuvalu bagi perempuan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 indeks demokrasi di Indonesia adalah 6.53 sedangkan pada tahun 2014, bertepatan dengan diadakannya kembali pemilihan umum serentak, indeks demokrasi di Indonesia mencapai 6.95<sup>12</sup> Adapun pengukuran indeks tersebut didasarkan pada beberapa poin penilaian yang mencakup proses elektoral dan pluralitas, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya.<sup>13</sup> Data tersebut menggambarkan adanya peningkatan dalam kurun waktu empat tahun namun angka tersebut tidak memiliki signifikansi pada peranan perempuan di dalam ranah politik dalam konteks demokrasi. Hal ini terbukti dengan minimnya angka partisipasi perempuan pada pemilihan umum 2009 dengan komposisi 18 % di DPR, 28 % di DPD, 16 % di DPRD Provinsi, dan 12 % di DPRD Kabupaten. Sedangkan untuk ruang lingkup lembaga eksekutif jumlah

---

<sup>12</sup> The Economist. "Democracy Index 2014 – Democracy and its discontents: A report from The Economist Intelligence Unit". <http://www.sudestada.com.uy/Content/Articles/421a313a-d58f-462e-9b24-2504a37f6b56/Democracy-index-2014.pdf> Halaman 5-1 diakses pada 11 Februari 2017.

<sup>13</sup> *Ibid.*

partisipasi perempuan mencapai 48 % namun hanya 13 % yang menduduki posisi pengambilan keputusan.<sup>14</sup>

Kondisi tersebut cukup memprihatinkan karena pada dasarnya, menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat (1) poin a menyebutkan bahwa:

*“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”*<sup>15</sup>

Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Daniel & Faith membuktikan bahwa terdapat korelasi antara tingkat diskriminasi terhadap perempuan di dalam aspek politik dengan proses politik suatu negara. Hal ini terlihat dengan semakin tinggi tingkat diskriminasi terhadap perempuan dalam aspek politik, maka akan menimbulkan efek yang tidak linier terhadap keberlangsungan sistem demokrasi negara tersebut.<sup>16</sup>

Berbeda dengan Indonesia, pemerintah Tuvalu belum menetapkan kuota minimum untuk keterlibatan perempuan dalam aspek politik, terutama dalam peran di parlemen dan proses pengambilan keputusan di dalamnya. Sehingga partisipasi politik perempuan di parlemen masih sangat minim. Menurut data dari *World Bank*,

---

<sup>14</sup> Jurnal Parlemen. “*Norwegia Danai Pemerintah Tingkatkan Peran Perempuan di Politik*” <http://www.jurnalparlemen.com/view/7268/norwegia-danai-pemerintah-tingkatkan-peran-perempuan-di-politik.html> diakses pada 12 Februari 2017

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Sekneg/UU\\_no\\_12\\_th\\_2003.pdf](http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Sekneg/UU_no_12_th_2003.pdf) diakses pada 1 Maret 2017

<sup>16</sup> Daniel Esemé Gbérévbie & Faith Osasumwen Oviasogie, 2013. “Women in Governance and Sustainable Democracy in Nigeria, 1999-2012”. *Economics & Sociology*, Vol. 6 (1) 2013: 89. Halaman 89-93.

partisipasi politik perempuan dalam parlemen di Tuvalu hanya berada pada angka 6,7 % dari total parlemen yang ada.<sup>17</sup> Hal ini cukup memprihatinkan dikarenakan pada tahun 1998-2010 angka partisipasi politik perempuan di dalam proses pengambilan keputusan di parlemen berada pada titik terendah yaitu 0 % yang berarti tidak ada keterwakilan perempuan sama sekali di dalam kursi parlemen. Namun Tuvalu menaruh perhatian akan permasalahan yang tengah dihadapi berkaitan dengan minimnya jumlah partisipasi politik perempuan di parlemen dengan membuat *National Gender Policy* yang dikeluarkan pada tahun 2014 dan berfokus pada empat indikator utama yaitu: penguatan institusi dan *capacity building*, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta memberantas kekerasan terhadap perempuan.<sup>18</sup> Kebijakan ini merupakan revisi terbaru dari *National Women's Policy* yang sudah terlebih dahulu dikeluarkan oleh Tuvalu setelah 21 tahun merdeka dari Inggris, yaitu pada tahun 1999.<sup>19</sup>

UNDP selaku organisasi internasional yang memang memfokuskan diri pada isu pembangunan, demokrasi dan lingkungan pada nyatanya memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat dengan memegang teguh prinsip non-diskriminasi. Di Indonesia, UNDP

---

<sup>17</sup> The Global Economy, "*Tuvalu Women in Parliament 1990-2015*" [http://www.theglobaleconomy.com/Tuvalu/Women\\_in\\_parliament/](http://www.theglobaleconomy.com/Tuvalu/Women_in_parliament/) diakses pada 14 Maret 2017.

<sup>18</sup> The Government of Tuvalu, "*National Gender Policy*", [https://spccfpstore1.blob.core.windows.net/digitallibrary-docs/files/fd90c6f24b65ff5795243e5606b837b8.pdf?sv=2015-12-11&sr=b&sig=gx68sRRuH4bse6x65P4LnA8oODe74PZWDzS5SLrnfB8%3D&se=2017-09-25T03%3A33%3A37Z&sp=r&rsc=public%2C%20max-age%3D864000%2C%20max-stale%3D86400&rsct=application%2Fpdf&rscd=inline%3B%20filename%3D%22Tuvalu\\_National\\_Gender\\_Policy.pdf%22](https://spccfpstore1.blob.core.windows.net/digitallibrary-docs/files/fd90c6f24b65ff5795243e5606b837b8.pdf?sv=2015-12-11&sr=b&sig=gx68sRRuH4bse6x65P4LnA8oODe74PZWDzS5SLrnfB8%3D&se=2017-09-25T03%3A33%3A37Z&sp=r&rsc=public%2C%20max-age%3D864000%2C%20max-stale%3D86400&rsct=application%2Fpdf&rscd=inline%3B%20filename%3D%22Tuvalu_National_Gender_Policy.pdf%22) diakses pada 14 Maret 2017.

<sup>19</sup> *Ibid.*

memiliki serangkaian program dan kegiatan yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan mitra internasional untuk dapat mengaktualisasikan visi UNDP bersamaan dengan pemenuhan rencana maupun prioritas-prioritas negara Indonesia.<sup>20</sup>

Sehingga yang menjadi persoalan adalah bagaimana perbandingan efektivitas fungsi UNDP membantu pemerintah Indonesia dan Tuvalu mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender dalam konteks partisipasi politik perempuan.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Adapun untuk penelitian ini penulis membatasi lingkup permasalahan pada upaya dan fungsi dari organisasi internasional UNDP dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender pada konteks partisipasi politik perempuan sebagai bentuk promosi demokrasi. Penulis membatasi penelitian dari tahun 2011 hingga tahun 2015 untuk UNDP Indonesia seturut dengan jangka waktu program SWARGA dan 2013 hingga 2016 untuk Tuvalu seturut dengan *pilot project* Pacific Women in Politics dan *project Practice Parliament for Women*.

UN memiliki dua kategori evaluasi yaitu evaluasi independen dan evaluasi terdesentralisasi. Untuk penelitian komparatif ini penulis menggunakan unit komparasi berupa *Outcome Evaluation* yang merupakan salah satu dari ragam tipe kategori evaluasi yang terdesentralisasi. *Outcome Evaluation* ini memiliki 3 buah indikator yang mencakup: (1) Faktor-faktor pendukung pencapaian *outcome*, (2) kontribusi yang telah dilakukan oleh UNDP untuk membuat *outcome*, dan (3)

---

<sup>20</sup> United Nations. "United Nations Partnership for Development Framework 2011 – 2015: Indonesia". 2010. Halaman 4-6.

efektivitas strategi kerjasama yang dibangun untuk mencapai *outcome*. Ketiga indikator ini terdapat pada *Evaluation Policy* yang dikeluarkan oleh UN sejak tahun 2006 silam dan biasa digunakan untuk mengevaluasi serta melihat sejauh mana efektivitas fungsi dari UNDP dalam mencapai tujuan yang dimilikinya.<sup>21</sup>

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Dengan melihat pada permasalahan yang diangkat pada penelitian ini maka penulis merumuskan pertanyaan masalah sebagai berikut: ***“Bagaimana perbandingan efektivitas fungsi UNDP membantu pemerintah Indonesia dan Tuvalu mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender dalam konteks partisipasi politik perempuan?”***

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan efektivitas dari langkah-langkah yang ditempuh oleh UNDP selaku organisasi internasional dalam upayanya membantu pemerintah Indonesia dan Tuvalu mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender dalam konteks partisipasi politik perempuan pada tahun 2011 – 2016.

---

<sup>21</sup> UNDP. *“Handbook on Planning, Monitoring, and Evaluating for Development Results”*, (New York: UNDP, 2009), halaman 130-133.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini adalah untuk menjadi referensi bagi civitas akademika yang memiliki ketertarikan pada kelompok bidang ilmu yang membahas mengenai organisasi internasional dan isu kesetaraan gender, khususnya yang berfokus pada efektivitas fungsi organisasi internasional dan keterlibatan perempuan dalam konteks demokrasi yang tampak pada partisipasi perempuan dalam ranah politik. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, civitas akademika dapat mengetahui mengenai fungsi organisasi internasional dan upayanya meningkatkan kesetaraan gender dalam ranah politik dengan melihat perbandingan efektivitas UNDP di dua negara, dalam hal ini ialah Indonesia dan Tuvalu.

### **1.4 Kajian Terdahulu**

Kajian mengenai upaya organisasi internasional dalam mencapai kesetaraan gender melalui keterlibatan dalam pemerintahan belum mendapat sorotan yang banyak dari kalangan akademisi. Penulis menyadari perlu adanya kajian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini sebagai referensi. Terdapat dua buah jurnal dan sebuah buku yang telah penulis kaji guna mendukung penelitian mengenai *United Nations Development Programme* dalam upayanya untuk mempromosikan pemerintahan demokratis yang berfokus pada kesetaraan gender di Indonesia dan Tuvalu.

Penelitian pertama dilakukan oleh Bekim Sejdiu dan Murat Önsoy dengan fokus pembahasan mengenai peran dari PBB selaku *non-state actor* dalam

mempromosikan demokrasi kepada negara-negara anggotanya. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2014. Adapun yang menjadi pertanyaan riset dalam penelitian ini adalah “Bagaimana keterlibatan PBB dalam mempromosikan demokrasi mendapatkan justifikasi secara normatif dan landasan institusional?”. Sehingga dalam artikel ini dibahas mengenai bagaimana langkah PBB dalam mempromosikan demokrasi serta apa saja capaian yang telah diraih. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai pola keterlibatan PBB terkait upaya promosi demokrasi yang dijelaskan melalui konteks normatif. Dalam penelitian ini diuraikan bahwa secara normatif, upaya promosi demokrasi tidak lepas dari komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam *UN Charter*, *Vienna Declaration and Programme Action*, *Universal Declaration of Human Rights*, dan *International Convention on Civil and Political Rights*.<sup>22</sup> Kedua penyusun makalah ini berargumentasi bahwa hak asasi manusia dan demokrasi perlu didukung oleh langkah-langkah eksternal yang bersinggungan dengan aspek sosio-kultural yang menjadi perhatian para akademisi dan pembuat kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan riset, digunakan perspektif historis dan didukung oleh konsep liberal dan demokrasi seperti *democratic peace theory* Immanuel Kant yang mengasumsikan bahwa sesama negara demokrasi tidak akan saling menyerang satu sama lain. Dalam makalah ini juga disinggung mengenai UNDP selaku badan dari PBB yang bekerja dalam ranah yang berkaitan antara demokrasi dan pembangunan. UNDP secara aktif

---

<sup>22</sup> Bekim Sejdiu & Murat Önsoy, 2014. “Unveiling the Unknown Face: The Role of the United Nations in Promoting Democracy”. *Perceptions*, Vol. 19 (2) 2014: 33. Halaman 33-35.

melakukan upaya promosi demokrasi melalui serangkaian program dan proyek di negara-negara anggota.<sup>23</sup>

Literatur kedua adalah buku yang ditulis oleh *United Nations Non-Governmental Liaison Service* yang berfokus terhadap cerita-cerita berkaitan dengan isu perempuan dalam langkah-langkah yang telah ditempuh oleh PBB dalam upayanya mempromosikan kesetaraan gender dengan cara peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam roda pemerintahan melalui pembentukan *legal framework* di tataran internasional hingga *capacity building* yang dilakukan oleh negara-negara bekerjasama dengan lembaga-lembaga dalam naungan PBB. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2007. Dalam tulisan ini diuraikan kondisi historis peran perempuan sebelum dan setelah dirumuskannya *legal framework* yang menjamin hak-hak perempuan agar setara dalam praktiknya. Dalam hasil penelitiannya dikatakan bahwa aspek historis memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran masyarakat dan pemerintah terkait dengan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan roda pemerintahan. Jumlah partisipasi perempuan dalam praktik politik pun turut meningkat dengan adanya forum-forum internasional yang khusus membahas mengenai hak perempuan dan kesetaraan gender.<sup>24</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Daniel Esemé Gberevbíe & Faith Osasumwen Oviasogie yang diterbitkan pada tahun 2013. Permasalahan ketidaksetaraan gender dalam hal peran dan kesempatan untuk turut ambil bagian dalam roda pemerintahan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 44-46.

<sup>24</sup> UN Non-Governmental Liaison Service, "*The Unfinished Story of Women and the United Nations*", (New York: United Nations, 2007), halaman 37-56.

telah menjadi permasalahan global, terutama bagi negara-negara berkembang termasuk Nigeria. Adapun fokus dari penelitian ini ialah melihat hubungan kausalitas dari dua variabel yaitu partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan praktik demokrasi yang berkelanjutan di Nigeria. Implikasi dari partisipasi non-aktif perempuan dalam proses politik tergambar sebagai sebuah negasi dari sistem demokrasi yang utuh dan merupakan sebuah kemunduran bagi proses sosial dalam masyarakat.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini dipaparkan argumentasi kedua penulis bahwa sistem pemerintahan yang demokratis perlu ditunjang dengan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal partisipasi pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas. Argumentasi yang dibangun adalah adanya korelasi antara tingkat diskriminasi terhadap perempuan dengan proses politik suatu negara. Semakin tinggi tingkat diskriminasi terhadap perempuan, maka akan berimplikasi buruk terhadap keberlangsungan sistem demokrasi negara tersebut.

Ketiga kajian terdahulu yang dipaparkan di atas merupakan penelitian dengan kajian yang hampir serupa dengan penelitian yang ingin penulis lakukan ini. Sebagian besar kajian membicarakan peranan dan upaya pemerintah berkaitan dengan promosi demokrasi dan upaya mencapai kesetaraan gender secara parsial. Penulis melihat bahwa penelitian pertama tidak berfokus pada bagaimana upaya UNDP secara spesifik pada perbandingan dua negara melainkan secara umum sebagai bagian dari PBB dan belum ada yang membahas mengenai kesetaraan gender dalam upaya

---

<sup>25</sup> Daniel Esemé Gberville & Faith Osasumwen Oviasogie, 2013. "Women in Governance and Sustainable Democracy in Nigeria, 1999-2012". *Economics & Sociology*, Vol. 6 (1) 2013: 89. Halaman 89-103.

promosi demokrasi. Hal tersebut yang membedakan penelitian Bekim Sejdiu dan Murat Önsoy dengan penulis yang memfokuskan upaya UNDP dalam promosi demokrasi yang berfokus pada kesetaraan gender di Indonesia dan Tuvalu. Kemudian pada penelitian kedua penulis melihat bahwa tulisan tersebut memberikan insentif dalam hal elaborasi konsep yang berkenaan dengan upaya mempromosikan kesetaraan gender dan demokrasi pada tataran internasional, khususnya dalam ranah PBB. Hanya saja, upaya tersebut datang dari UNGA di PBB dan bukan pada UNDP secara khusus seperti yang penulis bahas dalam penelitian ini. Pada penelitian ketiga belum dibahas mengenai peran serta dari organisasi internasional dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan upaya promosi kesetaraan gender dan demokrasi seperti yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini. Adapun insentif untuk penelitian yang akan penulis lakukan dari penelitian ketiga ini berfokus pada kausalitas antara partisipasi perempuan dan demokrasi. Namun yang belum dibahas di sini ialah langkah-langkah konkret apa saja yang dapat dilakukan untuk menggambarkan kausalitas yang ada. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai upaya promosi demokrasi yang mengedepankan aspek kesetaraan gender yang dilakukan oleh UNDP di Indonesia dan Tuvalu dan bagaimana efektivitas fungsi UNDP di kedua negara tersebut.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis merupakan seperangkat komponen yang terdiri dari konsep dan teori yang mampu menggambarkan pemahaman yang relevan terkait dengan topik yang akan dibahas oleh penulis. Kerangka teoritis harus mampu menggambarkan relevansi dengan bidang kajian peneliti. Selain itu, perlu diperhatikan kesesuaian, kemudahan dalam mengaplikasikan konsep dan teori pada penelitian serta sejauh mana teori dan konsep tersebut dapat digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisa permasalahan yang sedang diteliti dengan mengacu pada pertanyaan penelitian.<sup>26</sup>

Dalam kerangka teoritis, teori memiliki arti penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi dan memahami fenomena yang diteliti. Pada banyak kasus, keberadaan teori pun berfungsi untuk memperdalam pemahaman dengan asumsi-asumsi yang melekat di dalamnya.<sup>27</sup> Dengan adanya kerangka teoritis, peneliti dapat memfokuskan analisa terhadap data-data yang di dapat untuk menunjang variabel-variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori dan konsep yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji masalah penelitian. Teori yang digunakan ialah liberalisme dengan pendekatan liberalisme institusional. Sedangkan untuk konsep, penulis

---

<sup>26</sup> University of Southern California, "Organizing Your Social Science Research Paper: Theoretical Framework", USC Libraries, <http://libguides.usc.edu/writingguide/theoreticalframework> diakses pada 7 Maret 2017.

<sup>27</sup> Gabriel Abend, "The Meaning of Theory." *Sociological Theory* 26 (June 2008): 173–199.

<sup>28</sup> University of Southern California, *Ibid.*

menggunakan konsep IGO, konsep demokrasi, konsep HAM, dan konsep kesetaraan gender.

Penelitian ini menggunakan paradigma liberalisme. Pandangan ini melihat bahwa hubungan internasional sebagai sebuah wilayah yang dinamis dan memiliki potensi untuk berubah dari waktu ke waktu. Liberalisme menghargai kebebasan individu, oleh sebab itu perlu adanya batasan-batasan bagi negara agar tidak menciderai kebebasan, khususnya kebebasan pada tataran individu tersebut. Hal ini tentu saja berbeda dengan pandangan realisme. Untuk cakupan domestik suatu negara yang menganut hukum liberal, pemerintah dibatasi oleh akuntabilitas demokratis.<sup>29</sup> Yang perlu diperhatikan, pada dasarnya liberalisme menitikberatkan pada *human nature* yang positif sehingga pandangan ini percaya bahwa prinsip-prinsip rasional dapat diaplikasikan dalam lingkup internasional melalui adanya kerjasama.<sup>30</sup>

Berangkat dari paradigma tersebut, penulis mengambil pendekatan yang lebih spesifik dalam melihat kasus yang diteliti yaitu pendekatan Liberalisme Institusional. Pandangan ini melihat bahwa institusi internasional memiliki dampak yang positif dan berguna. Negara pada hakikatnya memiliki interaksi berkelanjutan satu sama lain dan menurut pendekatan ini ialah dengan cara menjalin kerjasama walaupun berada pada lingkungan yang bersifat anarki. Interaksi yang berkelanjutan memungkinkan bagi negara untuk membentuk institusi internasional. Dengan adanya institusi

---

<sup>29</sup> Martin Griffiths, *"Fifth Key Thinkers in International Relations"*, (London: Routledge, 1999), halaman 51.

<sup>30</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *"Introduction to International Relations: Theories and Approaches – Fifth Edition"*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), halaman 100-101.

internasional maka dapat tercipta solusi yang efisien atas suatu permasalahan yang memang menjadi ranah dari organisasi atau institusi internasional yang spesifik. Organisasi internasional dalam pandangan tokoh-tokoh liberal institusional merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku negara dalam lingkup tertentu. Lingkup tertentu dalam hal ini biasa disebut dengan istilah rezim. Untuk cakupan dari organisasi internasionalnya pun beragam, dapat bersifat universal maupun regional. Di sini organisasi internasional hadir untuk membantu mempromosikan kerjasama antarnegara dan sekaligus juga mengatasi permasalahan rendahnya tingkat kepercayaan antarnegara yang merupakan permasalahan tradisional dalam konteks anarki.<sup>31</sup>

Sedangkan konsep lain yang digunakan disini ialah konsep demokrasi guna melihat upaya UNDP selaku organisasi internasional dalam mempromosikan pemerintahan demokratis. Pemahaman mengenai demokrasi menjadi sangat penting karenanya. Menurut Francis Fukuyama, demokrasi bukan hanya sekedar ekspresi dari gagasan atau pun nilai-nilai kultural, lebih dari itu, demokrasi merupakan produk dari tekanan struktural dalam masyarakat. Terdapat korelasi antara tingkat ekonomi terhadap stabilitas demokrasi. Pada negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi dan tergolong maju, stabilitas demokrasinya lebih terjamin.<sup>32</sup> Sistem demokrasi juga sangat mengedepankan pemenuhan akan hak-hak mendasar bagi setiap individu, atau yang lebih kita kenal sebagai hak asasi manusia.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 110-113.

<sup>32</sup> Francis Fukuyama, *“Political Order and Political Decay – From Industrial Revolution to The Globalization of Democracy”*, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014), halaman 401.

Sebagai salah satu konsep lainnya yang dibahas dalam penelitian ini kita perlu melihat lebih jauh mengenai apa itu hak asasi manusia beserta dengan cakupannya. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu. HAM memiliki tiga buah prinsip utama yang tercantum dalam *Universal Declaration on Human Rights* yaitu universalitas, integrasi dan non-diskriminasi. Yang dimaksudkan dengan prinsip universalitas ialah bahwa setiap negara memiliki tugas untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Sedangkan prinsip integrasi menekankan bahwasannya semua hak — hak politik, hak sosial, hak budaya, hak sipil, hak atas pendidikan, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas pekerjaan — saling berkaitan satu sama lain dan merupakan kesatuan dalam hak asasi manusia. Berbeda dengan kedua prinsip sebelumnya, non-diskriminasi merupakan prinsip yang berkaitan erat dengan kebebasan dan larangan atas segala bentuk tindakan yang membeda-bedakan dan cenderung bersifat tidak adil.<sup>33</sup>

Konsep selanjutnya yang digunakan ialah konsep kesetaraan gender. Menurut penulis konsep ini merupakan dasar yang jelas bagi pembahasan lebih lanjut dalam penelitian dan akan berhubungan erat dengan konsep HAM dan demokrasi. Karena kesetaraan gender merupakan aspek yang dijamin dalam hak asasi manusia. Kesetaraan gender menurut *Cambridge English Dictionary* ialah keadaan dimana terdapat kesetaraan perlakuan terhadap individu satu dengan individu lainnya,

---

<sup>33</sup> “What are Human Rights?”, *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner*, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx> diakses pada 7 Maret 2017.

terlepas dari gender yang melekat di dalam diri individu tersebut.<sup>34</sup> Menurut Simone de Beauvoir, pada dasarnya hal-hal yang berkaitan dengan gender seringkali dikonstruksikan menjadi suatu dikotomi antara ordinasi dan sub-ordinasi.<sup>35</sup> Oleh sebab itu ketidaksetaraan gender dapat muncul sebagai tindak lanjut dari konstruksi sosial yang sedemikian rupa. Padahal, terlepas dari gender yang melekat dalam diri, setiap individu memiliki hak yang sama sebagai manusia.

Kesetaraan gender dapat dicapai melalui adanya pengarusutamaan gender. Menurut PBB, yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender adalah sebagai berikut:

*'... a gender perspective in all policies and programmes so that, before decisions are taken, an analysis is made of the effects on women and men, respectively' (United Nations 1995: 116)*<sup>36</sup>

Berangkat dari definisi di atas tampak bahwasannya melalui pengarusutamaan gender dapat tercipta kesetaraan antar perempuan dan laki-laki dalam berbagai keputusan yang diambil dalam aspek kehidupan. Salah satu aspek yang menjadi pembahasan disini ialah kesetaraan gender dalam konteks demokrasi yaitu melalui partisipasi politik perempuan di dalam parlemen dan proses pengambilan keputusan yang ada di dalamnya.

---

<sup>34</sup> Cambridge English Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gender-equality> diakses pada 29 November 2017

<sup>35</sup> Josh Jones, "Open Culture: Simone de Beauvoir in Rare 1959 TV Interview" <http://www.openculture.com/2016/08/simone-de-beauvoir-in-rare-1959-tv-interview.html> diakses pada 4 Desember 2017

<sup>36</sup> Laura J. Shepherd, "Gender Matters in Global Politics", (New York: Routledge, 2010), Halaman 190.

Adapun konsep lain yang digunakan dalam pembahasan dalam penelitian ini ialah konsep mengenai *Intergovernmental Organizations* (IGOs). Menurut Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst dalam bukunya yang berjudul “*The Theoretical Foundations of Global Governance*” yang dimaksudkan dengan IGO adalah organisasi non profit pemerintah yang berada pada tataran internasional, setidaknya beranggotakan tiga negara, memiliki aktivitas di beberapa negara dan anggotanya terikat pada perjanjian formal antarnegara. IGO dapat beroperasi secara global maupun regional. Jumlah negara anggota pada umumnya memiliki korelasi dengan fokus organisasi, semakin sedikit negara anggotanya maka semakin spesifik cakupan isunya. Dalam praktiknya, IGO memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi kebijakan di negara anggotanya sesuai dengan isu atau ranah IGO tersebut.<sup>37</sup>

Berbicara mengenai fungsi dari organisasi internasional, Clive Archer dalam bukunya yang berjudul “*International Organizations*” menyebutkan bahwa terdapat sembilan fungsi yang dapat dimiliki oleh organisasi internasional. Adapun kesembilan fungsi tersebut mencakup: (1) fungsi operasional, (2) fungsi informasi, (3) fungsi norma, (4) fungsi artikulasi dan agregasi, (5) fungsi rekrutmen, (6) fungsi sosialisasi, (7) fungsi pembuatan aturan, (8) fungsi pengaplikasian aturan, dan (9) fungsi adjudikasi aturan.<sup>38</sup> Namun, dari kesembilan fungsi tersebut, penulis hanya memfokuskan pada fungsi pertama dalam pembahasan mengenai penelitian

---

<sup>37</sup> Margaret P. Karns & Karen A. Mingst, “*International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*”, (London: Lynne Rienner Publisher, 2004), halaman 7-9.

<sup>38</sup> Clive Archer, “*International Organizations: Third Edition*”, (London: Routledge, 2001) Halaman 92-108

perbandingan efektivitas fungsi UNDP selaku organisasi internasional kali ini. Berikut merupakan penjelasan mengenai fungsi operasional:

fungsi ini erat kaitannya dengan langkah-langkah operasional yang dapat dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya, pada umumnya berkaitan dengan isu penyediaan bantuan, pembangunan dan juga kegiatan ekonomi yang melibatkan komoditi.<sup>39</sup>

Secara khusus dalam penelitian ini yang menjadi fungsi dari UNDP ialah sebagai berikut: (1) mempromosikan keberlanjutan sebagai suatu aspek fundamental, (2) mendukung sistem pemerintahan demokratis menjadi lebih inklusif dan akuntabel, dan (3) mencegah terjadinya risiko dalam setiap langkah pembangunan yang diambil.<sup>40</sup>

Dalam penelitian komparatif ini penulis menggunakan alat ukur berupa unit komparasi yang telah seringkali digunakan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi organisasi internasional dalam hal membantu negara yang membutuhkan bantuan teknis dan operasional, dalam konteks ini tentu saja berbicara mengenai upaya menangani ketidaksetaraan gender dalam konteks partisipasi politik perempuan. Unit komparasi tersebut ialah *Outcome Evaluation* yang merupakan salah satu dari ragam tipe kategori evaluasi yang terdesentralisasi menurut *United Nations Evaluation Group*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> United Nations Development Programme, “2014 UNDP Brochure”, Halaman 1  
[http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/UNDP-Brochure-2014\\_EN.pdf](http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/UNDP-Brochure-2014_EN.pdf)

<sup>41</sup> UNDP. “*Handbook on Planning, Monitoring, and Evaluating for Development Results*”, (New York: UNDP, 2009), halaman 130.

Dalam menggunakan alat ukur ini, peneliti mengambil tiga buah indikator yang terdapat dari mekanisme *Outcome Evaluation*. Nantinya, ketiga indikator tersebut dijadikan dasar dalam menganalisa efektivitas fungsi UNDP yang telah dijalankan dalam program maupun *project* yang telah berlangsung guna membantu pemerintah Indonesia dan Tuvalu.

Adapun ketiga indikator dalam *Outcome Evaluation* yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

a) Faktor-faktor pendukung pencapaian *outcome*:

Peneliti melihat faktor-faktor di sekitar kasus yang diteliti dalam mencapai *outcome*. Adapun pada poin ini terdapat empat buah kategorisasi yaitu Sangat Sesuai, Sesuai, Tidak Sesuai dan Sangat Tidak Sesuai sebagai tolak ukur dari efektivitas fungsi yang dijalankan oleh UNDP di Indonesia dan di Tuvalu.

b) Kontribusi yang telah dilakukan oleh UNDP untuk membuat *outcome*:

Pada poin ini dilihat kesesuaian kontribusi UNDP untuk membuat *outcome* dengan prioritas nasional masing-masing negara dengan empat buah kategorisasi yaitu Sangat Sesuai, Sesuai, Tidak Sesuai dan Sangat Tidak Sesuai sebagai tolak ukur.

c) Strategi kerjasama yang dibangun untuk mencapai *outcome*:

Penulis mengukur dari jumlah mitra kerjasama yang dimiliki oleh UNDP di Indonesia dan Tuvalu dalam usahanya mencapai *outcome*.

Ketiga indikator ini terdapat pada *Evaluation Policy* yang dikeluarkan oleh PBB dan digunakan sejak tahun 2006 silam. Indikator ini biasa digunakan untuk mengevaluasi serta melihat sejauh mana efektivitas fungsi dari organisasi di dalam naungan PBB, termasuk UNDP, dalam mencapai tujuan yang dimilikinya.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan teknik sistematis dan intuitif penelitian dalam membantu akademisi maupun praktisi dalam menghasilkan pengetahuan dengan langkah yang efisien dan memiliki koherensi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh teknik empiris dalam merancang dan melakukan sebuah penelitian.<sup>42</sup>

### **1.6.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian komparatif. Pada penelitian kualitatif, jenis penelitian komparatif merupakan salah satu alat analisa yang paling fundamental. Hal ini dikarenakan jika melakukan penelitian komparatif maka deskripsi yang dihasilkan akan menjadi lebih tajam dan mendalam, serta memainkan peran sentral dalam membentuk formasi konsep dengan menaruh fokus pada persamaan dan perbedaan yang ditemukan di antara dua variabel yang dibandingkan

---

<sup>42</sup> Profesor John C. King, "Qualitative Research Methods in International Affairs for Masters Students", *American University*, 2011, [http://www.american.edu/sis/faculty/upload/2011SP-SIS-680-001\\_King.pdf](http://www.american.edu/sis/faculty/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdf), diakses pada 10 Maret 2017.

di dalam penelitian melalui adanya unit komparasi yang telah ditentukan. Dalam ilmu politik serta studi internasional, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian yang sesuai dan menarik untuk diimplementasikan dalam usaha mencari temuan-temuan guna membuktikan hipotesis yang ada.<sup>43</sup>

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dengan mencari sumber-sumber data primer dan sekunder. Data-data primer yang digunakan penulis ambil dari dokumen yang dipublikasikan langsung oleh organisasi internasional yang bersangkutan yaitu UNDP, dokumen kenegaraan seperti rencana pembangunan dari negara Indonesia dan Tuvalu, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti hukum internasional maupun perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian. Sedangkan untuk data-data sekunder penulis ambil dari jurnal internasional dan nasional serta informasi dari situs *online* seperti surat kabar, buku, laporan, maupun situs-situs yang membahas mengenai informasi yang diperlukan.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan penulis menjabarkan rangkaian penelitian secara berkesinambungan dari Bab 1 hingga Bab 5. Penjabaran penelitian berkaitan

---

<sup>43</sup> David Collier, "*Comparative Method*", (Washington, D.C. : American Political Science Association, 1993) <http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3827/APSA-TheComparativeMethod.pdf> diakses pada 20 maret 2017

dengan apa saja yang dibahas dalam setiap bab. Pada penelitian ini penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab sebagai berikut.

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian terkait dengan pemenuhan HAM dan kondisi ketidaksetaraan gender di negara yang menganut sistem demokrasi yaitu Indonesia dan Tuvalu, khususnya pada aspek partisipasi politik perempuan. Selain itu dalam bab ini juga dibahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur terdahulu, kerangka pemikiran yang akan digunakan, metode penelitian, serta rencana penulis dalam penyusunan penelitian ini yang ditampilkan melalui sebuah linimasa penelitian.

Bab kedua membahas mengenai UNDP sebagai organisasi internasional. Pada bab ini dibahas secara mendalam mengenai apa itu UNDP, apa yang dilakukan oleh UNDP, struktur UNDP serta cara kerja UNDP dalam upaya promosi pemerintahan demokratis yang berfokus pada kesetaraan gender.

Bab ketiga membahas mengenai masalah ketidaksetaraan gender dalam konteks demokrasi di kedua negara yang akan dibandingkan dalam penelitian ini. Pada bab ini dibahas mengenai apa yang dimaksud dengan masalah ketidaksetaraan gender secara umum dan secara khusus dalam konteks demokrasi, kemudian keadaan partisipasi politik perempuan di Indonesia dan di Tuvalu. Pembahasan untuk masing-masing negara akan mencakup aspek historis, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah serta data-data kuantitatif menyangkut kondisi partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan hingga tahun 2016.

Bab keempat membahas mengenai bagaimana perbandingan efektivitas fungsi UNDP membantu pemerintah Indonesia dan Tuvalu mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender dalam konteks partisipasi politik perempuan di dalam pemerintahan yang demokratis sesuai dengan pertanyaan penelitian ini. Pada bab ini dibahas mengenai upaya UNDP dalam mempromosikan pemerintahan demokratis yang berfokus pada kesetaraan gender di Indonesia dan Tuvalu, hubungan upaya tersebut dengan kebijakan nasional masing-masing negara, serta analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Terakhir, pada bab lima telah ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian ini. Penarikan kesimpulan didasarkan pada temuan-temuan dalam penelitian, data-data yang didapatkan serta analisa perbandingan yang dihasilkan dalam bab-bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang serupa dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini.

